RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2023

INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG

P E M E R I N T A H K O T A M A G E L A N G
INSPEKTORAT DAERAH
JL. Jend. Sarwo Edi Wibowo No. 2 Magelang 56101
Telp. (0293) 363646, Website : inspektoratmagelangkota.go.id;
Email :inspektoratmglkota@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2023.

Rencana Kerja 2023 merupakan langkah atau upaya pelaksanaan anggaran, program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja maupun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Tahun 2023.

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2023 yang merupakan implementasi tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Magelang dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Magelang diharapkan dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Magelang, serta dapat dijadikan acuan kerja selama 1 tahun ke depan dan pedoman dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan.

Magelang, 25 Juli 2022
INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
INSPEKTORAT DAERAH

DEDDY EKO SUMARWANTO, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19690705 199703 1 007

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		iv
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1 Latar Belakang		1
1.2 Landasan Hukum		2
1.3 Maksud dan Tujuan		4
1.4 Sistematika Penulisan		5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU		6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra		6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Magelang		20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi		32
2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra OPD		37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat		44
BAB III TUJUAN, SASARAN PD		45
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional		45
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD		49
3.3 Program dan Kegiatan		49
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		52
4.1. Tujuan dan Sasaran		52
4.2. Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2022		52
4.3. Rencana Program dan Kegiatan Renja Inspektorat Tahun 2022		53
BAB V PENUTUP		57
5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan. Rencana tindak lanjut		57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	7
Tabel 2.2 Capaian Kinerja Program Inspektorat Daerah Kota Magelang	8
Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Kota Magelang	13
Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang	14
Tabel 2.5 Hasil Pengukuran IKU Inspektorat Kota Magelang	20
Tabel 2.6 Capaian sasaran strategis 1 Inspektorat Daerah Kota Magelang	21
Tabel 2.7 Capaian sasaran strategis 2 Inspektorat Daerah Kota Magelang	22
Tabel 2.8 Hasil Penilaian SPIP	22
Tabel 2.9 Capaian sasaran strategis 3 Inspektorat Daerah Kota Magelang	23
Tabel 2.10 Hasil QA Kapabilitas APIP	24
Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Magelang	25
Tabel 2.12 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2020 & 2021	25
Tabel 2.13 Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Semester 1 Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2022	26
Tabel 2.14 Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2021	29
TABEL 2.15 Review Terhadap Rancangan awal RKPD Inspektorat Kota Magelang Tahun 2022	39
Tabel 2.16 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kota Magelang Tahun 2023	44
Tabel 3. 1 Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang	48
Tabel 4.1 Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Inspektorat Kota Magelang	52
Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kota Magelang		21

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rencana Kerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Rencana Kerja PD ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam penyusunan Renja PD Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) PD Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

Seperti yang telah termuat dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Magelang, bahwa untuk mewujudkan visi, misi yang telah ditetapkan setiap Perangkat Daerah (PD) harus merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya. Proses penyusunan rencana program dan kegiatan yang biasa disebut dengan perencanaan kinerja kegiatan merupakan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah tahun 2023 telah melewati tahap-tahap seperti yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (Stake holder) yang ada, baik secara formal maupun non formal serta dengan memperhatikan hasil pelaksanaan di tahun 2021 sebagai bahan evaluasi kinerja. Garis besar proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah adalah :

1) Tahap Persiapan Kegiatan penyusunan rancangan Renja Inspektorat dilakukan sebelum Rancangan Awal RKPD diterima, atau segera setelah RAPBD tahun 2022 disahkan menjadi APBD. Langkah-langkah pada kegiatan persiapan mencakup identifikasi para pemangku kepentingan, pembentukan tim penyusun Renja PD, penyiapan kelembagaan forum PD, pengisian formulir (isian), penyusunan rencana kerja tim untuk penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Magelang.
2) Tahap Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen Kegiatan analisis dan pengkajian dokumen meliputi kajian terhadap rancangan awal RKP Nasional dan RKPD Kabupaten/Kota, review RPJM Nasional dan RPJM Provinsi, kajian terhadap RPJM Daerah dan Renstra PD, kajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PD, meminta/menerima rancangan awal RKPD secara resmi dari Bappeda.
3) Tahap Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja Kegiatan ini dilaksanakan setelah PD menerima secara resmi dokumen Rancangan Awal RKPD dari Bappeda. Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD dan kemudian disahkan oleh Walikota melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Magelang menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah berpedoman kepada Renstra Inspektorat Daerah. Renstra Inspektorat Daerah memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan rencana program setiap bidang kewenangan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh PD dan berkoordinasi dengan Bappeda.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Magelang memperhatikan dan menindaklanjuti visi, misi, arah kebijakan teknis dan rencana program dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPK, BPKP dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026;
15. Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Magelang;
16. Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2023 adalah sebagai pedoman dalam rangka merumuskan program dan kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan pembangunan di bidang pengawasan selama 1 (satu) tahun kedepan.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Inspektorat Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai panduan penyusunan rencana program/kegiatan tahunan sehingga program/kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas dan mengacu pada RPJMD Kota Magelang;
2. Agar program/kegiatan tiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan;
3. Dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui perencanaan yang bertanggung jawab;
4. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumberdaya aparatur secara maksimal dan terukur tingkat capaian kinerjanya ;
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah pada Inspektorat Kota Magelang.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja Inspektorat Daerah Kota Magelang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Magelang
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- 4.1. Tujuan dan Sasaran
- 4.2. Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023
- 4.3. Rencana Program dan Kegiatan Renja Inspektorat Tahun 2023

BAB V PENUTUP
- 5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan. Rencana tindak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Berdasarkan RKPD Kota Magelang Tahun 2023, Inspektorat Kota Magelang mendukung sasaran daerah "Terciptanya Birokrasi yang bersih dan akuntabel". Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, lnspektorat Kota Magelang merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kota Magelang dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Magelang.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Magelang tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Magelang disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2023.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2023

meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2023 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Dari hasil evaluasi Program/Kegiatan Pada Tahun 2023, tidak ada kegiatan yang direncanakan namun tidak dapat dilaksanakan ataupun melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, namun terdapat 1 (satu) indikator capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Daerah Kota Magelang yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan analisis faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini dari BPK atas LKPD	WTP	WTP	100%	1. OPD/obrik masih kurang memahami untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan setelah terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan; 2. Belum sinkron dan fokusnya perencanaan antara target kinerja yang ditetapkan dengan program dan kegiatan untuk mencapai target yang diwujudkan. 3. Adanya pihak ketiga / instansi vertical dalam penyelesaian tindak lanjut yang berbeda tanggapan / kebijakannya.	1. Mengoptimalkan perbaikan perencanaan dengan melakukan cascade down agar program dan kegiatan dapat sinkron dan fokus untuk mencapai target yang telah ditetapkan. 2. Melaksanakan pemantauan terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan 3. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi bidang pembinaan dan pengawasan dalam upaya pembinaan dan pengendalian serta pendampingan pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah serta dalam mengawal pelaksanaan dan pembangunan di Kota Magelang. 4. Koordinasi dalam penyelesaian tindak lanjut dengan pihak ketiga/ instansi vertikal dan pemberi rekomendasi.
2	Peningkatan pengendalian internal	Penilaian Maturitas SPIP	3,5	3,038	87%	1. Satgas SPIP pada OPD belum berfungsi secara maksimal: 2. Dokumen SOP belum memadai 3. Penilaian Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian belum dilaksanakan dengan baik 4. Hasil Penilaian masih menggunakan penilaian pada tahun 2017, dikarenakan tidak ada penilaian SPIP dari BPKP, sehingga kurang mencerminkan keadaan pada	mengoptimalkan kinerja Tim SPIP Kota Magelang untuk melakukan kerjasama dengan BPKP untuk menyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
						tahun 2021	
3	Peningkatan level kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3	3	100%	masih kurangnya Sumber Daya Manusia dari segi kuantitas maupun kualitas	1. Mendorong peningkatan kematangan risiko manajemen pemerintah daerah dan mengimplementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan melakukan penilaian efektifitas pengelolaan resiko pemerintah daerah; 2. Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana kapabilitas pada Level 3 dengan mengimplementasikan Key Process Area (KPA) secara baik dan terus menerus, serta mempersiapkan untuk level kapabilitas yang lebih tinggi; 3. Melakukan Self Assessment secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP Level 3. 4. menambah personil yang dikirimkan untuk mengikuti sertifikasi fungsional pengawas, Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), serta menambah jumlah pegawai pada Inspektorat Kota Magelang dengan penerimaan CPNS maupun mutasi pegawai.

Adapun program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Magelang yang telah memenuhi target kinerja yang telah direncanakan dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kota Magelang, telah dirumuskan tujuh (3) program dengan indikator keberhasilan capaian sasaran program dan kegiatan serta hasil evaluasi rencana aksi program sebagai berikut:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Program Inspektorat Daerah Kota Magelang

PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Persentase pemenuhan pelayanan dan penyelenggaraan tugas umum kantor	%	100	100
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya kualitas pengendalian intern obyek pemeriksaan	Persentase terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai Renwas/RP3D	%	100	100
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Peningkatan fungsi APIP sebagai consulting partner dan quality assurance	Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi	%	100	100

1. Sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dengan indikator pencapaian sasaran Persentase pemenuhan pelayanan dan penyelenggaraan tugas umum kantor sebesar 100%. Dalam mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan dann sub kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran program adalah:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya Laporan Renja dan Renstra OPD sebanyak 3 dokumen.
   2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya RKA OPD sebanyak 1 dokumen.
   3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya Dokumen Perubahah RKA SKPD sebanyak 1 dokumen.
   4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya Dokumen DPA SKPD sebanyak 1 dokumen.
   5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya Dokumen Perubahan DPA SKPD sebanyak 1 dokumen.
   6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya Laporan Capaian kinerja OPD dan LKJiP OPD sebanyak 5 laporan.
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator pencapaian sasaran tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 12 bulan.
   2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan OPD sejumlah 12 laporan.
   3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya Laporan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan.
   4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya laporan prognosis SKPD sebanyak 1 laporan.
c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya laporan PAK sebanyak 2 dokumen.
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator pencapaian sasaran tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan.

2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator pencapaian sasaran tersedianya bahan logistik kantor selama 12 bulan.
3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan indikator pencapaian sasaran tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan.
4) Penyediaan Bahan/Material dengan indikator pencapaian sasaran tersedianya kebersihan kantor selama 12 bulan.
5) Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan indikator pencapaian sasaran penyediaan fasilitasi kunjungan tamu selama 12 bulan.
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator pencapaian sasaran tersedianya penyelenggaraan rakor dan konsultasi selama 12 bulan.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indikator pencapaian sasaran adalah terpenuhinya kegiatan administrasi surat menyurat perkantoran selama 12 bulan.
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator pencapaian sasaran tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik selama 12 bulan.
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator pencapaian sasaran tersedianya jasa pelayanan umum kantor selama 12 bulan.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator pencapaian sasaran terpeliharanya kendaraan dinas jabatan sebanyak 7 unit.
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator pencapaian sasaran terpeliharanya kendaraan dinas operasional sebanyak 15 unit.
3) Pemeliharaan Mebel dengan indikator pencapaian sasaran terpeliharanya mebeleur sebanyak 6 unit.
4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator pencapaian sasaran terpeliharanya peralatan dan mesin sebanyak 34 unit.
5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator pencapaian sasaran terpeliharanya gedung kantor sebanyak 1 unit.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100 % dengan predikat "Sangat Baik", sehingga dapat dikatakan berhasil

mendukung capaian sasaran strategis dalam mencapai indikator kinerja utama OPD.

2. Sasaran Program Penyelenggaraan pengawasan adalah meningkatnya kualitas pengendalian intern obyek pemeriksaan dengan indikator pencapaian sasaran persentase terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai Renwas/RP3D sebesar 100%. Dalam mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran program adalah:
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
      1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan indikator pencapaian sasaran tersusunya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah sebanyak 2 Laporan.
      2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan indikator pencapaian sasaran tersusunya Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 1 Laporan.
      3) Reviu Laporan Kinerja dengan indikator pencapaian sasaran tersusunya Laporan Reviu Laporan Kinerja sebanyak 2 Laporan.
      4) Reviu Laporan Keuangan dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya Laporan Reviu Laporan Keuangan sebanyak 3 Laporan.
      5) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya Laporan Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan sebanyak 2 Laporan.
   b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
      1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya laporan penanganan penyelesaian kerugian daerah sejumlah 1 laporan.
      2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya laporan pengawasan dengan tujuan tertentu sejumlah 1 laporan.

   Program Penyelenggaraan pengawasan memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100 % dengan predikat "Sangat Baik", sehingga dapat dikatakan berhasil mendukung capaian sasaran strategis dalam mencapai indikator kinerja utama OPD.

3. Sasaran Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi adalah peningkatan fungsi APIP sebagai consulting partner dan quality assurance dengan indikator pencapaian sasaran Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi. Dalam mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran program adalah:
   a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya sisdur dan kebijakan pengawasan sejumlah 1 dokumen.

b. Pendampingan dan Asistensi

1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya laporan pendampingan dan asistensi urusan pemda sejumlah 1 laporan.
2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya Laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi sejumlah 3 laporan.
3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sejumlah 5 laporan.
4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan indikator pencapaian sasaran tersusunnya Laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas sejumlah 1 laporan.

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat "Sangat Baik", sehingga dapat dikatakan berhasil mendukung capaian sasaran strategis dalam mencapai indikator kinerja utama OPD.

Beberapa program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Magelang diatas dapat mencapai target yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Peningkatan volume monitoring dan evaluasi melalui kegiatan-kegiatan rapat koordinasi teknis, pemanggilan obyek pemeriksaan dalam rangka percepatan penyelesaian temuan.
2. Adanya koordinasi sistem informasi dan system pengendalian intern dalam pelaksanaan pengendalian program kegiatan Inspektorat Daerah Kota Magelang.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Inspektorat dengan diklat, bimbingan teknis maupun Pelatihan Kantor Sendiri (PKS).

Pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran sebagaimana tabel berikut;

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2020 & 2021

No	RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021							Target 2022	Ket.
	Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator	Tahun 2020	Realisasi 2021 Triwulan					
				I	II	III	IV		
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Misi : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah								
	Tujuan : Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dengan aparatur professional dan berintegritas								
	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminasi	Nilai Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	-	-	WTP	-

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Magelang tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat Daerah Kota yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah hanya dapat disajikan pada tahun n-1, dikarenakan dengan adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, nama program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 berbeda dengan Tahun Anggaran 2021. Adanya perbedaan Nomenklatur sehingga Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renstra tidak bisa dihitung Capaian Kinerja n-2 dan n-3 dengan perbandingan Tahun 2022 dan Tahun 2021. Adapun akhir periode kinerja berakhir di Tahun 2021 dan dilanjutkan dengan Renstra 2021-2026, maka analisis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang

Nama OPD : INSPEKTORAT DAERAH KOTA MAGELANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan *(output)*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan pelayanan dan penyelenggaraan tugas umum kantor	100%	Persen	100%	Persen	100%	100%	100%
6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat ketepatan penyerahan pelaporan administrasi keuangan	100%	Persen	100%	Persen	100%	100%	100%
	6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	100%	100%
	6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	100%	100%
	6.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	100%	100%
	6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	100%	100%
	6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan *(output)*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8
	Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	SKPD yang disusun							
	6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	5	Laporan	5	Laporan	100%	100%	100%
6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat ketepatan penyerahan pelaporan administrasi keuangan	100%	Persen	100%	Persen	100%	100%	100%
	6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	12	Bulan	100%	100%	100%
	6.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan OPD	12	Laporan	12	Laporan	100%	100%	100%
	6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	Laporan	1	Laporan	100%	100%	100%
	6.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis yang disusun	1	Laporan	1	Laporan	100%	100%	100%
6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	Persen	100%	Persen	100%	100%	100%
	6.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan PAK	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	100%	100%
6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	Persen	100%	Persen	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan *(output)*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8
	6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Bulan	12	Bulan	100%	100%	100%
	6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan bahan logistik kantor	12	Bulan	12	Bulan	100%	100%	100%
	6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	12	Bulan	12	Bulan	100%	100%	100%
	6.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan kebersihan kantor	12	Bulan	12	Bulan	100%	100%	100%
	6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan fasilitasi kunjungan tamu	12	Bulan	12	Bulan	100%	100%	100%
	6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rakor dan konsultasi SKPD	12	Bulan	12	Bulan	100%	100%	100%
6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	12	Bulan	12	Bulan	100%	100%	100%
	6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12	Bulan	12	Bulan	100%	100%	100%
	6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12	Bulan	12	Bulan	100%	100%	100%
	6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	Bulan	12	Bulan	100%	100%	100%
6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan	100%	Persen	100%	Persen	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan *(output)*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		prasarana kantor.							
	6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	7	Unit	7	Unit	100%	100%	100%
	6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	15	Unit	15	Unit	100%	100%	100%
	6.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	6	Unit	6	Unit	100%	100%	100%
	6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	34	Unit	34	Unit	100%	100%	100%
	6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	Unit	1	Unit	100%	100%	100%
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai Renwas/RP3D	100%	Persen	100%	Persen	100%	100%	100%
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persentase entitas yang sudah menindaklanjuti hasil pemeriksaan	100%	Persen	100%	Persen	100%	100%	100%
	6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan kinerja yang dilaksanakan	2	Laporan	2	Laporan	100%	100%	100%
	6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan keuangan yang dilaksanakan	1	Laporan	1	Laporan	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan *(output)*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8
	6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah reviu laporan kinerja yang dilaksanakan	2	Laporan	2	Laporan	100%	100%	100%
	6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah reviu laporan keuangan yang dilaksanakan	3	Laporan	3	Laporan	100%	100%	100%
	6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah laporan Monev Tindak Lanjut Pemeriksaan	4	Laporan	4	Laporan	100%	100%	100%
6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang tepat waktu	100%	Persen	100%	Persen	100%	100%	100%
	6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah penanganan penyelesaian kerugian negara atau daerah yang ditindaklanjuti	1	Laporan	1	Laporan	100%	100%	100%
	6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	1	Laporan	1	Laporan	100%	100%	100%
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi	100%	Persen	100%	Persen	100%	100%	100%
6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Persentase Kebijakan Teknis yang dirumuskan dan tepat waktu	100%	Persen	100%	Persen	100%	100%	100%
	6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis bidang pengawasan yang dihasilkan	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan *(output)*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8
6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi		Persentase jumlah Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnyameningkat	100%	Persen	100%	Persen	100%	100%	100%
	6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	1	Laporan	1	Laporan	100%	100%	100%
	6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah pendampingan, verifikasi dan asistensi penilaian Reformasi Birokrasi	3	Laporan	3	Laporan	100%	100%	100%
	6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	Laporan	5	Laporan	100%	100%	100%
	6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	1	Laporan	1	Laporan	100%	100%	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Magelang

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Magelang dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Magelang akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Capaian Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kota Magelang berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kota Magelang adalah sebagai berikut

Tabel 2.5
Hasil Pengukuran IKU Inspektorat Kota Magelang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	5	5
1.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah	Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	opini	WTP	WTP	100%
2.	Peningkatan pengendalian Internal	Penilaian Maturitas SPIP	Nilai	3.5	NA (3,08) (Penilaian tahun 2017, karena tidak ada penilaian SPIP dari BPKP)	88%
3.	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%
		RATA-RATA CAPAIAN				96%

Dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan indikator kinerja sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja untuk tahun 2021, pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kota Magelang adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 :

"Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah "

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat baik.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6
Capaian sasaran strategis 1 Inspektorat Daerah Kota Magelang

No	Indikator Kinerja	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	3	4	5	5	5
1.	Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	opini	WTP	WTP	100%

Gambar 2.1
Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kota Magelang

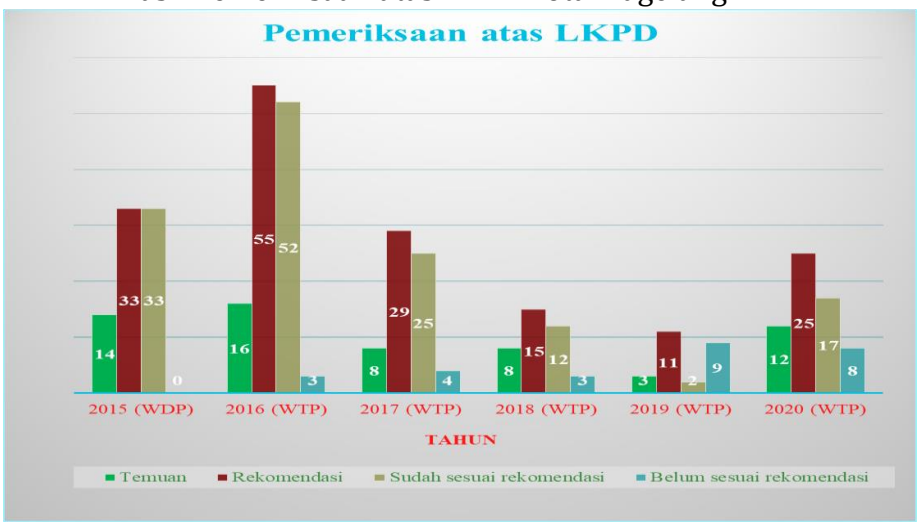

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD TA 2020 adalah jumlah keseluruhan 12 temuan yang terdiri dari 25 rekomendasi,masih ada 8 rekomendasi yang belum sesuai dan masih dalam proses tindak lanjut. Oleh karena itu perlu upaya secara signifikan untuk mempertahankan pencapaian opini WTP ini.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran 1 adalah;

1. OPD/obrik masih kurang memahami untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan setelah terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan;
2. Belum sinkron dan fokusnya perencanaan antara target kinerja yang ditetapkan dengan program dan kegiatan untuk mencapai target yang diwujudkan.
3. Adanya pihak ketiga / instansi vertical dalam penyelesaian tindak lanjut yang berbeda tanggapan / kebijakannya.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah dengan:

1. Mengoptimalkan perbaikan perencanaan dengan melakukan cascade down agar program dan kegiatan dapat sinkron dan fokus untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan pemantauan terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan
3. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi bidang pembinaan dan pengawasan dalam upaya pembinaan dan pengendalian serta pendampingan pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah serta dalam mengawal pelaksanaan dan pembangunan di Kota Magelang.
4. Koordinasi dalam penyelesaian tindak lanjut dengan pihak ketiga/ instansi vertikal dan pemberi rekomendasi.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1, didukung oleh pelaksanaan program penyelenggaraan pengawasan dengan realisasi sumber daya keuangan sebesar 86,84% dari total pagu.

Sasaran 2 :

"Peningkatan pengendalian Internal "

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran peningkatan pengendalian internal dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 88% dengan predikat tinggi. Sasaran ini masih menggunakan hasil evaluasi SPIP tahun 2017, karena Inspektorat Daerah Kota Magelang tidak mendapatkan evaluasi SPIP dari BPKP, sehingga masih menggunakan Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada tahun 2017.

Hasil pengukuran indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 2.7
Capaian sasaran strategis 2 Inspektorat Daerah Kota Magelang

No	Indikator Kinerja	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	3	4	5	5	5
2.	Penilaian Maturitas SPIP	Nilai	3.5	NA (3,08) (Penilaian tahun 2017, karena tidak ada penilaian SPIP dari BPKP)	88%

Kesimpulan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota Magelang adalah Level 3 (terdefinisi) dengan skor 3,038 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.8
Hasil Penilaian SPIP

No	Unsur-unsur SPIP	Hasil Penilaian		
		Nilai	Bobot	Skor
1	Lingkungan Pengendalian	3,000	30,00%	0,938
2	Penilaian Resiko	3,000	20,00%	0,600

No	Unsur-unsur SPIP	Hasil Penilaian		
		Nilai	Bobot	Skor
3	Kegiatan Pengendalian	3,000	25,00%	0,750
4	Informasi dan Komunikasi	3,000	10,00%	0,300
5	Pemantauan	3,000	15,00%	0,450
		3,000	100,00%	3,038

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian tersebut, maka Inspektorat Daerah Kota Magelang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun daftar resiko dan rencana tindak pengendalian pada semua OPD;
2. Melakukan evaluasi secara berkala atas efektifitas kebijakan dan implementasi serta menindaklanjuti saran atau hasil evaluasi tersebut;
3. Menyelenggarakan penyelenggaraan SPIP dengan memperhatikan substansi pengendalian intern untuk masing-masing unsur dan sub unsur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran 2 adalah;

1. Satgas SPIP pada OPD belum berfungsi secara maksimal:
2. Dokumen SOP belum memadai
3. Penilaian Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian belum dilaksanakan dengan baik

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target pada tahun selanjutnya adalah dengan mengoptimalkan kinerja Tim SPIP Kota Magelang untuk melakukan kerjasama dengan BPKP untuk menyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2, didukung oleh pelaksanaan program penyelenggaraan pengawasan dengan realisasi sumber daya keuangan sebesar 86,84% dari total pagu.

Sasaran 3 :

"Peningkatan Kapabilitas APIP "

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran peningkatan kapabilitas APIP dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100 % dengan predikat Sangat Baik. Hasil pengukuran indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 2.9

Capaian sasaran strategis 3 Inspektorat Daerah Kota Magelang

No	Indikator Kinerja	Satuan	2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	3	4	5	5	5
3.	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%

Dari hasil Quality Assurance menyimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kota Magelang telah berada pada Level 3 untuk semua elemen sebagai berikut:

Tabel 2.10
Hasil QA Kapabilitas APIP

No	Elemen	Level
1	Peran dan Layanan	3
2	Pengelolaan sumber daya manusia	3
3	Praktik professional	3
4	Akuntabilitas dan manajemen kinerja	3
5	Budaya dan hubungan organisasi	3
6	Struktur tata kelola	3

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian tersebut, maka Inspektorat Daerah Kota Magelang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan kematangan risiko manajemen pemerintah daerah dan mengimplementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan melakukan penilaian efektifitas pengelolaan resiko pemerintah daerah;
2. Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana kapabilitas pada Level 3 dengan mengimplementasikan Key Process Area (KPA) secara baik dan terus menerus, serta mempersiapkan untuk level kapabilitas yang lebih tinggi;
3. Melakukan Self Assessment secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP Level 3.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran 3 adalah masih kurangnya Sumber Daya Manusia dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas APIP yang memiliki sertifikasi fungsional pengawas masih tergolong rendah. Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan adalah menambah personil yang dikirimkan untuk mengikuti sertifikasi fungsional pengawas, Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), serta menambah jumlah pegawai pada Inspektorat Kota Magelang dengan penerimaan CPNS maupun mutasi pegawai.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 3, didukung oleh pelaksanaan Program Pendampingan dan Asistensi dengan realisasi keuangan sebesar 96,79%.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan serta capaian dari target program/kegiatan Inspektorat Daerah. Adapun evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dari program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Magelang

NO	Indikator	SPM standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Maturitas SPIP			3,5	3,5	3,5	3,5	3,038	3,038	3,038	3,038	
2	Kapabilitas APIP			3	3	3	3	3	3	3	3	
3	Opini BPK atas LK			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
4	Jumlah Temuan BPK			2	12	2		2	12	6	6	
5	Persentase Tindak Lanjut			96,00 %	95,00 %	96,00 %		93,07%	95,78 %	87%	88%	

Tabel 2.12
Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang
Tahun 2020 & 2021

No	RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021						Realisasi 2020	Target 2021	Ket
	Program	Indikator	Realisasi 2021 Triwulan						
			I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Cakupan pemeriksaaan (diperinci dari Orbik SKPD, Satker dan BUMD plus targetnya)	100%	100%	-	-	100%	87%	
		Persentase Aparat SPIP aktif	89,66%	89,66%	-	-	89,66%	80%	
		Persentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	0%	0%	-	-	100%	90%	
2	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Level APIP Kota Magelang menjadi level 3	3	3	-	-	3	3	
		Persentase APIP yang bersertifikat Kompetensi meningkat	90,48%	94,74%	-	-	100%	80%	
		Persentase APIP yang bersertifikat penunjang	90,48%	90,48%	-	-	100%	85%	

No	RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021						Realisasi 2020	Target 2021	Ket
	Program	Indikator	Realisasi 2021 Triwulan						
			I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7		8	9
		meningkat							
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase LKJIP SKPD dengan nilai baik	0%	0%	-	-	86,21%	90%	
		Penurunan kasus temuan LKPD	4	5	-	-	0	0	
4	Program Sinergitas Penerapan SPI	Penurunan temuan administrasi (SPI) hasil Pemeriksaan APIP	92,31%	82,44%	-	-	83,33%	55%	
		Penurunan temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksanaan APIP	0,09%	0,09%	-	-	0,23%	5%	
		Persentase implementasi SPIP	89,66%	89,66%	-	-	89,66%	100%	

Tabel 2.13
Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Semester 1 Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2022

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Keuangan		Fisik	
				Rp.	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	6.01.0.00.0.00.24.0000	**Inspektorat**	**8.107.902.000**	**3.119.078.986**	**38,47%**	**55,67%**	**45,54%**
	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					
1	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.01 . 6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.199.000	1.068.500	2,09%	97,64%	50,00%
2	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.01 . 6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.502.000	0	0,00%	0,00%	0,00%
3	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.01 . 6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.504.000	0	0,00%	0,00%	0,00%
4	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.01 . 6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.564.000	0	0,00%	0,00%	0,00%
5	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.01 . 6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.483.000	0	0,00%	0,00%	0,00%

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Keuangan		Fisik	
				Rp.	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.01 . 6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.620.000	1.249.000	77,10%	79,01%	70,00%
	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					
7	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.02 . 6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.997.498.000	2.688.226.389	38,42%	55,60%	50,00%
8	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.02 . 6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.677.000	1.264.500	27,04%	32,07%	50,00%
9	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.02 . 6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.676.000	1.633.700	97,48%	100,00%	100,00%
10	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.02 . 6.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.655.000	0	0,00%	0,00%	0,00%
	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					
11	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.05 . 6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.881.000	1.333.750	34,37%	43,39%	50,00%
	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
12	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.06 . 6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.747.000	4.852.500	49,78%	49,98%	50,00%
13	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.06 . 6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.680.000	6.030.500	38,46%	50,13%	50,00%
14	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.06 . 6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.649.000	6.706.100	49,13%	49,67%	50,00%
15	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.06 . 6.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	9.052.000	6.787.500	74,98%	82,85%	70,00%
16	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.06 . 6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.680.000	7.120.510	52,05%	52,63%	70,00%
17	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.06 . 6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.614.000	33.664.238	42,82%	49,04%	60,00%
	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
18	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.582.000	5.105.450	44,08%	54,98%	50,00%

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Keuangan		Fisik	
				Rp.	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	. 6.01.01.2.08.01						
19	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.08 . 6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000	42.436.516	35,36%	50,00%	50,00%
20	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.08 . 6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.142.000	30.030.661	49,93%	50,01%	50,00%
	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
21	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.09 . 6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.425.000	20.336.910	30,62%	48,33%	50,00%
22	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.09 . 6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.770.000	26.525.900	34,55%	49,13%	50,00%
23	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.09 . 6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	1.036.000	34,53%	50,00%	40,00%
24	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.09 . 6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.000.000	9.170.000	41,68%	44,09%	50,00%
25	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.01 . 6.01.01.2.09 . 6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.000.000	2.882.000	26,20%	45,45%	30,00%
	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.02 . 6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**					
26	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.02 . 6.01.02.2.01 . 6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	40.736.000	16.773.950	41,18%	46,90%	50,00%
27	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.02 . 6.01.02.2.01 . 6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	8.116.000	1.626.000	20,03%	41,08%	50,00%
28	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.02 . 6.01.02.2.01 . 6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	4.901.000	4.150.000	84,68%	100,00%	80,00%
29	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.02 . 6.01.02.2.01 . 6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	18.866.000	17.561.206	93,08%	100,00%	90,00%
30	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.02 . 6.01.02.2.01 . 6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	68.669.000	30.035.600	43,74%	50,14%	70,00%
	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.02 . 6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**					

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Keuangan		Fisik	
				Rp.	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
31	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.02 . 6.01.02.2.02 . 6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	11.126.000	0	0,00%	46,14%	0,00%
32	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.02 . 6.01.02.2.02 . 6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	7.547.000	3.062.750	40,58%	47,49%	50,00%
	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.03 . 6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**					
33	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.03 . 6.01.03.2.01 . 6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	4.423.000	0	0,00%	0,00%	0,00%
	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.03 . 6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**					
34	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.03 . 6.01.03.2.02 . 6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	2.328.000	900.500	38,68%	51,55%	50,00%
35	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.03 . 6.01.03.2.02 . 6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	129.451.000	45.386.100	35,06%	77,70%	75,00%
36	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.03 . 6.01.03.2.02 . 6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	210.027.000	94.456.006	44,97%	52,94%	70,00%
37	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24.0000 . 6.01.03 . 6.01.03.2.02 . 6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	22.112.000	7.666.250	34,67%	40,31%	60,00%
	T O T A L		**8.107.902.000**	**3.119.078.986**	**38,47%**	**55,67%**	**45,54%**

Tabel 2.14
Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat Daerah Kota Magelang
Tahun 2021

No.	Kode Rekening		Nama OPD/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Keuangan	Fisik		
					Rp.	%	Target	%
1	2		3	4	5	6	7	8
	6.01.0.00.0.00.24		**Inspektorat**	**6.847.390.122**	**5.608.477.812**	**81,91%**	**100,00%**	**100,00%**
	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**13.575.000**	**13.549.000**			
1	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.01 . 1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	100,00%	100,00%	100,00%
2	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.01 . 2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	2.000.000	100,00%	100,00%	100,00%
3	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.01 . 3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	1.994.000	99,70%	100,00%	100,00%

No.	Kode Rekening		Nama OPD/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Keuangan	Fisik		
					Rp.	%	Target	%
1	2		3	4	5	6	7	8
4	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.01 . 4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	2.000.000	100,00%	100,00%	100,00%
5	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.01 . 5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	2.000.000	100,00%	100,00%	100,00%
6	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.01 . 6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.575.000	3.555.000	99,44%	100,00%	100,00%
	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.780.340.122**	**4.702.217.331**			
7	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.02 . 1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.769.880.122	4.691.888.681	81,32%	100,00%	100,00%
8	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.02 . 3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.460.000	6.417.500	99,34%	100,00%	100,00%
9	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.02 . 5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	1.950.150	97,51%	100,00%	100,00%
10	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.02 . 8		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000	1.961.000	98,05%	100,00%	100,00%
	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**4.602.000**	**4.362.900**			
11	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.05 . 3		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.602.000	4.362.900	94,80%	100,00%	100,00%
	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**147.007.000**	**129.258.124**			
12	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.06 . 1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.747.000	7.973.000	81,80%	100,00%	100,00%
13	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.06 . 4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.680.000	13.271.375	84,64%	100,00%	100,00%
14	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.06 . 5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.724.000	17.116.000	96,57%	100,00%	100,00%
15	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.06 . 7		Penyediaan Bahan/Material	9.452.000	9.275.550	98,13%	100,00%	100,00%
16	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.06 . 8		Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.080.000	19.072.622	99,96%	100,00%	100,00%
17	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.06 . 9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.324.000	62.549.577	83,04%	100,00%	100,00%
	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**203.615.000**	**169.681.787**			
18	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.08 . 1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.467.000	12.435.900	99,75%	100,00%	100,00%

No.	Kode Rekening		Nama OPD/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Keuangan	Fisik		
					Rp.	%	Target	%
1	2		3	4	5	6	7	8
19	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.08 . 2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121.200.000	87.695.825	72,36%	100,00%	100,00%
20	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.08 . 4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.948.000	69.550.062	99,43%	100,00%	100,00%
	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**204.860.000**	**129.617.082**			
21	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.09 . 1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.425.000	41.895.348	63,07%	100,00%	100,00%
22	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.09 . 2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.770.000	45.461.734	49,54%	100,00%	100,00%
23	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.09 . 5		Pemeliharaan Mebel	6.000.000	5.982.000	99,70%	100,00%	100,00%
24	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.09 . 6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.665.000	29.564.000	99,66%	100,00%	100,00%
25	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 1 . 2.09 . 9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.000.000	6.714.000	61,04%	100,00%	100,00%
	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 2 . 2.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**153.485.000**	**133.456.174**			
26	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 2 . 2.01 . 1		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	44.600.000	38.974.610	87,39%	100,00%	100,00%
27	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 2 . 2.01 . 2		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	9.100.000	6.302.000	69,25%	100,00%	100,00%
28	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 2 . 2.01 . 3		Reviu Laporan Kinerja	7.000.000	6.851.500	97,88%	100,00%	100,00%
29	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 2 . 2.01 . 4		Reviu Laporan Keuangan	25.000.000	21.049.750	84,20%	100,00%	100,00%
30	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 2 . 2.01 . 7		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	67.785.000	60.278.314	88,93%	100,00%	100,00%
	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 2 . 2.02		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**25.000.000**	**21.533.226**			
31	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 2 . 2.02 . 1		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	15.000.000	13.023.000	86,82%	100,00%	100,00%
32	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 2 . 2.02 . 2		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10.000.000	8.510.226	85,10%	100,00%	100,00%
	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 3 . 2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan**	**4.000.000**	**4.000.000**			

No.	Kode Rekening		Nama OPD/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Keuangan	Fisik		
					Rp.	%	Target	%
1	2		3	4	5	6	7	8
			Fasilitasi Pengawasan					
33	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 3 . 2.01 . 1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	4.000.000	4.000.000	100,00%	100,00%	100,00%
	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 3 . 2.02		**Pendampingan dan Asistensi**	**310.906.000**	**300.802.188**			
34	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 3 . 2.02 . 1		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3.000.000	2.557.000	85,23%	100,00%	100,00%
35	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 3 . 2.02 . 2		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	71.377.000	66.478.688	93,14%	100,00%	100,00%
36	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 3 . 2.02 . 3		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	225.769.000	222.903.000	98,73%	100,00%	100,00%
37	6.01 . 6.01.0.00.0.00.24 . 3 . 2.02 . 4		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10.760.000	8.863.500	82,37%	100,00%	100,00%
	T O T A L			**6.847.390.122**	**5.608.477.812**	**81,91%**	**100,00%**	**100,00%**

Permasalahan/Kendala Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah Kota Magelang tahun 2021 antara lain :

1) Masih kurangnya komitmen entitas terperiksa untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan setelah terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan baik pemeriksaaan internal maupun eksternal;
2) Belum sinkron dan fokusnya perencanaan antara target kinerja yang ditetapkan dengan program dan kegiatan untuk mencapai target yang diwujudkan;
3) Belum optimalnya Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Online (SIMWAS Online);
4) Kegiatan pengawasan mandatory yang sering muncul diluar Program kerja pengawasan tahunan yang telah disusun;
5) Masih kurangnya jumlah pegawai secara kualitas maupun kuantitas khususnya Auditor di Inspektorat Daerah Kota Magelang.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/

keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam bidang pengawasan di Kota Magelang dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya lingkungan pengendalian, belum semua entitas mendapatkan pendampingan dan asistensi
   a. Saran perbaikan hasil evaluasi internal belum seluruhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja oleh OPD
   b. Belum optimalnya upaya pencegahan korupsi
   c. Belum optimalnya OPD dalam mengidentifikasi penilaian resiko
   d. Kurangnya Sumber Daya Aparatur dari segi kualitas maupun kuantitas
2. Belum maksimalnya kualitas pengawasan pada OPD, belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan Inspektorat
   a. Belum maksimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan di entitas
   b. Masih adanya rekomendasi yang belum ditindaklanjuti
   c. Kurangnya Sumber Daya Aparatur dari segi kualitas maupun kuantitas

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, dapat dirumuskan isu strategis yang terkait dalam bidang pengawasan yaitu :

1. Mengoptimalkan peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting Partners untuk peningkatan Nilai SAKIP Komponen evaluasi Internal;
2. Mengoptimalkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Pemerintah Kota Magelang.

2.3.1 Pelayanan Inspektorat Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Inspektorat Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati/wali kota dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah kabupaten/kota; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, inspektorat Daerah kabupaten/kota melaksanakan fungsinya tanpa menunggu penugasan dari bupati/wali kota dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Dalam hal pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah, apabila terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, inspektur Daerah kabupaten/kota wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan supervisi kepada inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah. Pelaksanaan supervisi melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah

Inspektorat sebagai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Inspektur berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota Magelang. Struktur Organisasi Inspektorat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Inspektorat Kota Magelang yang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Magelang yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang di pimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Beberapa permasalahan dan hambatan Inspektorat Daerah Kota Magelang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

a. Penerapan Pedoman Kendali Mutu belum dijalankan sepenuhnya;
b. Kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan;
c. Penerapan Manajemen Risiko belum dijalankan dengan maksimal;
d. Pembangunan Budaya Integritas belum menjadi suatu kebutuhan utama

2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016–2021, ditetapkan visi pembangunan Kota Magelang yaitu “Magelang Sebagai Kota Jasa yang Modern dan Cerdas yang Dilandasi

Masyarakat yang Sejahtera dan Religius" Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kota Magelang, yaitu:

1) MISI I Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2) MISI 2 Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.
3) MISI 3 Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataaan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4) MISI 4 Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang
5) MISI 5 Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Inspektorat Kota Magelang yang menyelenggarakan urusan pengawasan, diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara sesuai dengan Misi Walikota Magelang yang ke-3 yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif'. Tujuan misi ketiga ini adalah: "Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif", dengan sasaran yang akan dicapai pada Inspektorat Kota Magelang dalam membantu mewujudkan misi tersebut adalah menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Hal ini selaras dengan Perpres 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang diharapkan pada Tahun 2025 telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi Negara.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Daerah

Dalam meningkatkan pelayanan dalam peningkatan pelayanan Inspektorat Daerah terdapat beberapa tantangan dan peluang yang dapat dijadikan salah satu perumusan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

1) Semakin banyaknya peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting.
2) Semakin meningkatnya target kinerja pengawasan dan keuangan.

3) APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) dari suatu kegatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal.
4) Pola hubungan kerja jabatan fungsional yaitu PFA dan P2UPD yang belum jelas.
5) Komplektivitas pekerjaan dan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan mutu SDM Pengawasan.

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

1) Komitmen unsur pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik;
2) Adanya berbagai aturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran Inspektorat;
3) Keberadaan mitra seperti BPK, Irjen Kemendagri dan Kementerian Teknis lainnya, dan BPKP dalam kegiatan pengawasan
4) Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5) Adanya penugasan dari Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) mengenai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, serta Zona Integritas yang didukung oleh mitra/ stakeholder terkait;
6) Adanya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara APIP dan Aparat Penegak Hukum tentang penanganan Aduan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Proiritas Tahun 2023

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah dalam pelaksanan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam fungsi pengawasan. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

a) Meningkatkan kualitas pengawasan internal pemerintah melalui :
   1. Penerapan Fraud Management System dalam rangka implementasi program penanganan pandemi.
   2. Pengawasan berbasis teknologi informasi.
   3. Pencegahan dan penindakan praktik fraud.
   4. Pengembangan infrastruktur dan sistem pengawasan.
   5. Penguatan budaya integritas melalui penerapan Integrity Framework (perbaikan sistem, edukasi/kampanye dan penindakan)
   6. Pengelolaan SDM yang Optimal dalam rangka mewujudkan SDM yang Adaptif dan Technology Savvy (mengerti teknologi)
   7. Pengembangan SDM Pengawasan
   8. Optimalisasi Manajemen Risiko sebagai upaya peningkatan pengendalian intern

Perumusan arah kebijakan sebagai formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan diantaranya:

1. Pemenuhan Kebutuhan SDM pengawasan dengan kebijakan Rekrutmen dan impassing.
2. Penguatan system dan struktur pengawasan.
3. Peningkatan SDM Aparatur Pengawasan yang berkualitas dengan diklat/pelatihan/bintek.
4. Pengawasan reformasi birokrasi dan budaya integritas.
5. Mendorong peran aktif dari mitra kerja untuk mengidentifikasi risiko dan kelemahan yang ada guna mengefektifkan kegiatan pengawasan.

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra OPD

Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan ketentuan implementatitf dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Permendagri No 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan:

1. perencanaan pembangunan daerah;
2. perencanaan anggaran daerah;
3. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
4. akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
5. pertanggungjawaban keuangan daerah;
6. pengawasan keuangan daerah; dan
7. analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Adapun tujuan penggolongan/ pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase melalui penerapan Permendagri No 90 Tahun 2019 adalah untuk:

1. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
2. melakukan evaluasi perencanan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah;
3. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah;
4. mendukung penyelenggaraan sistem Infromasi Pemerintah Daerah (SIPD);

5. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
6. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan, telah dilakukan dalam bentuk verifikasi dan validasi oleh Tim Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur sesuai dengan pemetaan untuk selanjutnya ditambahkan dalam database Sistem Informasi pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. Rancangan awal RKPD dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan pada Inspektorat Daerah terdiri dari 3 program dan 10 kegiatan. Secara lebih jelas, rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel berikut:

TABEL 2.15

Review Terhadap Rancangan awal RKPD Inspektorat Kota Magelang Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	Indikator Kinerja	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisa Kebutuhan		PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	%
			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF		
INSPEKTORAT				Rp 7.138.116.223		Rp 7.138.116.223		
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Penunjang Kinerja OPD	100 persen	Rp 6.059.677.423	100 persen	Rp 6.059.677.423		
6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Inspektorat Kota Magelang**	**Persentase pemenuhan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD**	**100 persen**	**Rp 65.919.900**	**100 persen**	**Rp 65.919.900**	**Rp -**	**0%**
6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	Rp 2.000.000	2 dokumen	Rp 2.000.000	Rp 3.000.000	Rp -	0%
6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	Rp 2.000.000	1 dokumen	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp -	0%
6.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	Rp 2.000.000	1 dokumen	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp -	0%
6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	Rp 2.000.000	1 dokumen	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp -	0%
6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	Rp 2.000.000	1 dokumen	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp -	0%
6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	2 laporan	Rp	2 laporan	Rp	Rp	Rp -	0%

	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		55.919.900		55.919.900	2.000.000		
6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Inspektorat Kota Magelang**	**Persentase pemenuhan laporan administrasi keuangan PD sesuai aturan**	**100 persen**	**Rp 5.305.433.842**	**100 persen**	**Rp 5.305.433.842**	**Rp -**	**0%**
	6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 org/bln	Rp 5.295.733.842	29 org/bln	Rp 5.295.733.842	Rp 7.033.617.000	Rp -	0%
	6.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	Rp 5.700.000	12 dokumen	Rp 5.700.000	Rp 5.700.000	Rp -	0%
	6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Rp 2.000.000	1 laporan	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp -	0%
	6.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Rp 2.000.000	1 dokumen	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp -	0%
6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Inspektorat Kota Magelang**	**Persentase pemenuhan laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**	**Rp 4.601.800**	**100 persen**	**Rp 4.601.800**	**Rp -**	**0%**
	6.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 dokumen	Rp 4.601.800	2 dokumen	Rp 4.601.800	Rp 4.602.000	Rp -	0%
6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Inspektorat Kota Magelang**	**Persentase pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah**	**100 persen**	**Rp 221.139.400**	**100 persen**	**Rp 221.139.400**	**Rp -**	**0%**
	6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	Rp 9.744.700	10 paket	Rp 9.744.700	Rp 9.747.000	Rp -	0%
	6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	Rp 15.679.300	12 paket	Rp 15.679.300	Rp 15.680.000	Rp -	0%

	6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	Rp 17.723.800	12 paket	Rp 17.723.800	Rp 17.724.000	Rp -	0%
	6.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	Rp 9.047.600	12 paket	Rp 9.047.600	Rp 9.052.000	Rp -	0%
	6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	Rp 13.680.000	12 laporan	Rp 13.680.000	Rp 13.680.000	Rp -	0%
	6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Rp 155.264.000	12 laporan	Rp 155.264.000	Rp 105.324.000	Rp -	0%
6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Inspektorat Kota Magelang**	**Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**Rp 183.530.981**	**100 persen**	**Rp 183.530.981**	**Rp -**	**0%**
	6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	Rp 11.581.900	12 laporan	Rp 11.581.900	Rp 12.467.000	Rp -	0%
	6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Rp 117.924.900	12 laporan	Rp 117.924.900	Rp 120.000.000	Rp -	0%
	6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Rp 54.024.181	12 laporan	Rp 54.024.181	Rp 60.142.000	Rp -	0%
6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Inspektorat Kota Magelang**	**Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 persen**	**Rp 279.051.500**	**100 persen**	**Rp 279.051.500**	**Rp -**	**0%**
	6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	Rp 116.424.000	7 unit	Rp 116.424.000	Rp 66.425.000	Rp -	0%
	6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	Rp 126.764.000	15 unit	Rp 126.764.000	Rp 76.770.000	Rp -	0%
	6.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 unit	Rp 3.000.000	3 unit	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp -	0%

	6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 unit	Rp 21.864.000	32 unit	Rp 21.864.000	Rp 22.000.000	Rp -	0%
	6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Rp 10.999.500	1 unit	Rp 10.999.500	Rp 11.000.000	Rp -	0%
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	93 persen	Rp 225.796.200	93 persen	Rp 225.796.200		
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal		**Inspektorat Kota Magelang**	**Persentase Entitas yang sudah menindaklanjuti hasil pemeriksaan**	**92 persen**	**Rp 196.894.200**	**92 persen**	**Rp 196.894.200**	**Rp -**	**0%**
	6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	34 laporan	Rp 60.576.800	34 laporan	Rp 60.576.800	Rp 50.000.000	Rp -	0%
	6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	7 laporan	Rp 11.150.500	7 laporan	Rp 11.150.500	Rp 10.000.000	Rp -	0%
	6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	25 laporan	Rp 23.732.000	25 laporan	Rp 23.732.000	Rp 7.000.000	Rp -	0%
	6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	29 laporan	Rp 20.554.000	29 laporan	Rp 20.554.000	Rp 25.000.000	Rp -	0%
	6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 dokumen	Rp 80.880.900	12 dokumen	Rp 80.880.900	Rp 89.785.000	Rp -	0%
6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		**Inspektorat Kota Magelang**	**Persentase laporan penyelenggaraan PDTT yang tepat waktu**	**95 persen**	**Rp 28.902.000**	**95 persen**	**Rp 28.902.000**	**Rp -**	**0%**
	6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	0 laporan	Rp -	0 laporan	Rp -	Rp 15.000.000	Rp -	0%
	6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	25 laporan	Rp 28.902.000	25 laporan	Rp 28.902.000	Rp 10.000.000	Rp -	0%
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			Persentase entitas yang telah mendapatkan pendampingan dan	60 persen	Rp 852.642.600	60 persen	Rp 852.642.600		

			asistensi					
6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		**Inspektorat Kota Magelang**	**Persentase Kebijakan Teknis yang dirumuskan tepat waktu**	**100 persen**	**Rp 4.445.800**	**100 persen**	**Rp 4.445.800**	**Rp -**	**0%**
	6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 rekomendasi	Rp 4.445.800	1 rekomendasi	Rp 4.445.800	Rp 6.220.000	Rp -	0%
6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi		**Inspektorat Kota Magelang**	**Persentase jumlah PD yang nilai SAKIPnya meningkat; Persentase OPD yang memanfaatkan hasil monev**	**16,67 persen; 25 persen**	**Rp 848.196.800**	**16,67 persen; 25 persen**	**Rp 848.196.800**	**Rp -**	**0%**
	6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	11 laporan	Rp 30.688.000	11 laporan	Rp 30.688.000	Rp 3.000.000	Rp -	0%
	6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	25 laporan	Rp 509.242.900	25 laporan	Rp 509.242.900	Rp 149.000.000	Rp -	0%
	6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	26 laporan	Rp 271.423.000	26 laporan	Rp 271.423.000	Rp 229.369.000	Rp -	0%
	6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	30 laporan	Rp 36.842.900	30 laporan	Rp 36.842.900	Rp 29.998.000	Rp -	0%

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2021, Inspektorat Daerah memiliki peran penting dalam pencapaian kinerja akuntabilitas kinerja dan keuangan, good governance, clean government dan pelayanan publik, serta kegiatan penunjang pengawasan lainnya. Inspektorat Daerah akan menyempurnakan usulan program dan kegiatan sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat dan kondisi peraturan perundang-undangan jika mengalami perubahan dengan mengurangi ataupun menambah kegiatan yang sudah ada. Di tahun ini, Inspektorat daerah tidak menambah kegiatan.

Tabel 2.16
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kota Magelang Tahun 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
-	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi "Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur". Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV "Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur,melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing". Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2020-2024 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4)revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangung lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Inspektorat Jenderal melaksanankan visi Kementerian Dalam Negeri, yaitu: "Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong". Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, yang diinternalisasikan di lingkungan Inspektorat Jenderal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Adaptif.

   Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Inspektorat Jenderal ke depan mampu memposisikan sebagai Instansi yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

2) Profesional.

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

3) Proaktif.

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengan. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

4) Inovatif.

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku coordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Inspektorat Jenderal melaksanakan Misi Kementerian Dalam Negeri, dengan uraian sebagai berikut:

1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan

berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, yaitu:

1) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
2) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dijelaskan bahwa pada tahun 2019 diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme (selaras dengan Perpres 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025). Selain itu, diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, serta mind-set dan culture-set yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi. Pada tahun 2025, diharapkan telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Mempertimbangkan hal-hal di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada Rencana Strategis Tahun 2018-2023, yaitu: “Terwujudnya Penguatan Peran Pengawasan Internal dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik”. Salah satu fokus yang menjadi area perbaikan ke depannya adalah mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam mendukung kegiatan pengawasan melalui sistem e-audit.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur. Spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan. Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan medium term outcome atau outcome untuk jangka menengah. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran tercapainya Level 3 Penuh Kapabilitas APIP dan tercapainya Nilai 3,5 Maturitas SPIP.

Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan tugas Inspektorat yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah maka Inspektorat mempunyai kewajiban untuk ;

1) Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi;
2) Melaksanakan pengawasan dalam rangka mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Magelang;
3) Meningkatkan kualitas pengawasan agar lebih terstruktur;
4) Meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan;
5) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat dalam rangka menumbuhkan anggapan yang positif/kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur pengawasan.

Dalam Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 mengacu pada kebijakan Nasional, Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyelarasan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat dan Provinsi Jawa Tengah serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1
Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang

Analisis Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang	Isu Strategis
Isu Global TPB	Tujuan 16; Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh Tujuan17; Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
Isu Global Pandemi Covid-19	Pemanfaatan teknologi informasi
Isu Nasional RPJMN 2020-2024	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
Isu Regional, Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah	Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah
Isu Strategis RPJMD Kabupaten Magelang	Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel
Isu Strategis RPJPD Kota Magelang 2005-2025	Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
RTRW Kota Magelang 2011-2031	-

Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Magelang	Reformasi birokrasi
Isu Strategis RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026	Reformasi birokrasi

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Magelang dirumuskan untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai atau yang dihasilkan yang dianggap mampu mendukung upaya pencapaian visi misi Inspektorat dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam RENSTRA 2021-2016, Inspektorat Daerah Kota Magelang telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategik menuju perbaikan kinerja selama 5 (lima) tahun sesuai fungsi organisasi dengan merujuk pada penjabaran Misi Ketiga RPJMD Kota Magelang yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif" . Adapun Tujuan Inspektorat Kota Magelang dalam Renstra Inspektorat Kota Magelang adalah "Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif". Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Inspektorat telah menetapkan 2 sasaran strategis yaitu:

1. Peningkatan nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal;
2. Peningkatan Maturitas SPIP;

Dalam mencapai sasaran tersebut, maka ditetapkan indikator Inspektorat Kota Magelang yaitu;

1. Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal
2. Maturitas SPIP

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan telah dijabarkan pada telaahan Terhadap Kebijakan Nasional serta rumusan tujuan dan sasaran OPD. Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah dirumuskan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Magelang pada tahun 2023 sesuai dengan hasil telaah dalam mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah adalah;

6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

6.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP
6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material
6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
6.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel
6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja
6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan
6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi

6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran

Rencana Kerja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2023 perlu dilakukan dengan tetap mempedomani Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026. Dokumen ini juga tetap harus mengacu pada tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026. Berikut ini adalah Tujuan, Sasaran, Indikator yang ditetapkan dalam rangka mendukung visi misi Walikota Magelang;

TABEL 4.1

Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Inspektorat Kota Magelang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023
1	2	3	4	5
Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif				
Tujuan: Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif				
1.	Terciptanya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Maturitas SPIP	Angka	3,568
		Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal	Angka	8,1
	Meningkatkan Lingkup Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian	Nilai SAKIP Inspektorat	Angka	80,01
		Kapabilitas APIP	Angka	3,3
	Meningkatnya kualitas pengawasan internal pemerintah	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Angka	89

4.2. Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023

Penyusunan RENJA berpedoman pada renstra Inspektorat Daerah Kota Magelang dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RENJA merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat Daerah merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

4.3. Rencana Program dan Kegiatan Renja Inspektorat Tahun 2023

TABEL 4.2								
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju								
PROGRAM/KEGIATAN		LOKASI	Rancangan Awal RKPD		Prakiraan Maju		Sumber	Target Capaian
			TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	Dana	
INSPEKTORAT				Rp 7.138.116.223		Rp 7.138.116.223		
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100 persen	Rp 6.059.677.423	100 persen	Rp 6.059.677.423		
6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Inspektorat Kota Magelang**	**100 persen**	**Rp 65.919.900**	**100 persen**	**Rp 65.919.900**	**DAU**	**100%**
	6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	Rp 2.000.000	2 dokumen	Rp 2.000.000	Rp 3.000.000	DAU	100%
	6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	Rp 2.000.000	1 dokumen	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	DAU	100%
	6.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	Rp 2.000.000	1 dokumen	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	DAU	100%
	6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen	Rp 2.000.000	1 dokumen	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	DAU	100%
	6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	Rp 2.000.000	1 dokumen	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	DAU	100%
	6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	Rp 55.919.900	2 laporan	Rp 55.919.900	Rp 2.000.000	DAU	100%
6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Inspektorat Kota Magelang**	**100 persen**	**Rp 5.305.433.842**	**100 persen**	**Rp 5.305.433.842**	**DAU**	**100%**
	6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29 org/bln	Rp 5.295.733.842	29 org/bln	Rp 5.295.733.842	Rp 7.033.617.000	DAU	100%
	6.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP	12 dokumen	Rp 5.700.000	12 dokumen	Rp 5.700.000	Rp 5.700.000	DAU	100%
	6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Rp 2.000.000	1 laporan	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	DAU	100%
	6.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Rp 2.000.000	1 dokumen	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	DAU	100%
6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Inspektorat Kota Magelang**	**100 persen**	**Rp 4.601.800**	**100 persen**	**Rp 4.601.800**	**DAU**	**100%**
	6.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan	2 dokumen	Rp	2 dokumen	Rp	Rp 4.602.000	DAU	100%

TABEL 4.2								
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju								
PROGRAM/KEGIATAN		LOKASI	Rancangan Awal RKPD		Prakiraan Maju		Sumber	Target
	Administrasi Kepegawaian		4.601.800		4.601.800			
6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Inspektorat Kota Magelang**	**100 persen**	**Rp 221.139.400**	**100 persen**	**Rp 221.139.400**	**DAU**	**100%**
	6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 paket	Rp 9.744.700	10 paket	Rp 9.744.700	Rp 9.747.000	DAU	100%
	6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 paket	Rp 15.679.300	12 paket	Rp 15.679.300	Rp 15.680.000	DAU	100%
	6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 paket	Rp 17.723.800	12 paket	Rp 17.723.800	Rp 17.724.000	DAU	100%
	6.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	12 paket	Rp 9.047.600	12 paket	Rp 9.047.600	Rp 9.052.000	DAU	100%
	6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	Rp 13.680.000	12 laporan	Rp 13.680.000	Rp 13.680.000	DAU	100%
	6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Rp 155.264.000	12 laporan	Rp 155.264.000	Rp 105.324.000	DAU	100%
6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Inspektorat Kota Magelang**	**100 persen**	**Rp 183.530.981**	**100 persen**	**Rp 183.530.981**	**DAU**	**100%**
	6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	Rp 11.581.900	12 laporan	Rp 11.581.900	Rp 12.467.000	DAU	100%
	6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	Rp 117.924.900	12 laporan	Rp 117.924.900	Rp 120.000.000	DAU	100%
	6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	Rp 54.024.181	12 laporan	Rp 54.024.181	Rp 60.142.000	DAU	100%
6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Inspektorat Kota Magelang**	**100 persen**	**Rp 279.051.500**	**100 persen**	**Rp 279.051.500**	**DAU**	**100%**
	6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 unit	Rp 116.424.000	7 unit	Rp 116.424.000	Rp 66.425.000	DAU	100%
	6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 unit	Rp 126.764.000	15 unit	Rp 126.764.000	Rp 76.770.000	DAU	100%
	6.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	3 unit	Rp 3.000.000	3 unit	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	DAU	100%
	6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32 unit	Rp	32 unit	Rp	Rp 22.000.000	DAU	100%

TABEL 4.2								
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju								
PROGRAM/KEGIATAN		LOKASI	Rancangan Awal RKPD		Prakiraan Maju		Sumber	Target
	Lainnya		21.864.000		21.864.000			
	6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	Rp 10.999.500	1 unit	Rp 10.999.500	Rp 11.000.000	DAU	100%
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			93 persen	Rp 225.796.200	93 persen	Rp 225.796.200		
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal		**Inspektorat Kota Magelang**	**92 persen**	**Rp 196.894.200**	**92 persen**	**Rp 196.894.200**	**DAU**	**100%**
	6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	34 laporan	Rp 60.576.800	34 laporan	Rp 60.576.800	Rp 50.000.000	DAU	100%
	6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	7 laporan	Rp 11.150.500	7 laporan	Rp 11.150.500	Rp 10.000.000	DAU	100%
	6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	25 laporan	Rp 23.732.000	25 laporan	Rp 23.732.000	Rp 7.000.000	DAU	100%
	6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	29 laporan	Rp 20.554.000	29 laporan	Rp 20.554.000	Rp 25.000.000	DAU	100%
	6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 dokumen	Rp 80.880.900	12 dokumen	Rp 80.880.900	Rp 89.785.000	DAU	100%
6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		**Inspektorat Kota Magelang**	**95 persen**	**Rp 28.902.000**	**95 persen**	**Rp 28.902.000**	**DAU**	**100%**
	6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	0 laporan	Rp -	0 laporan	Rp -	Rp 15.000.000	DAU	100%
	6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	25 laporan	Rp 28.902.000	25 laporan	Rp 28.902.000	Rp 10.000.000	DAU	100%
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			60 persen	Rp 852.642.600	60 persen	Rp 852.642.600		
6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		**Inspektorat Kota Magelang**	**100 persen**	**Rp 4.445.800**	**100 persen**	**Rp 4.445.800**	**DAU**	**100%**
	6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1 rekomendasi	Rp 4.445.800	1 rekomendasi	Rp 4.445.800	Rp 6.220.000	DAU	100%
6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi		**Inspektorat Kota Magelang**	**16,67 persen; 25 persen**	**Rp 848.196.800**	**16,67 persen; 25 persen**	**Rp 848.196.800**	**DAU**	**100%**
	6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	11 laporan	Rp 30.688.000	11 laporan	Rp 30.688.000	Rp 3.000.000	DAU	100%

TABEL 4.2								
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju								
PROGRAM/KEGIATAN		LOKASI	Rancangan Awal RKPD		Prakiraan Maju		Sumber	Target
	6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	25 laporan	Rp 509.242.900	25 laporan	Rp 509.242.900	Rp 149.000.000	DAU	100%
	6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	26 laporan	Rp 271.423.000	26 laporan	Rp 271.423.000	Rp 229.369.000	DAU	100%
	6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	30 laporan	Rp 36.842.900	30 laporan	Rp 36.842.900	Rp 29.998.000	DAU	100%

BAB V

PENUTUP

5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan. Rencana tindak lanjut

Keberhasilan pelaksanaan Dokumen Rencana Kerja ini akan sangat tergantung pada komitmen semua pihak yang secara fungsional terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintah, termasuk ketersediaan sumber daya pendukung dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Inspektorat merupakan arah pelaksanaan program dan kegiatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan sasaran daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan. Output Rencana Kerja Inspektorat Daerah adalah Program Kerja Pangawasan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran program Inspektorat. Kaidah Pelaksanaan Inspektorat Daerah sebagai pemilik fungsi pengendalian intern atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah senantiasa meningkatkan kualitas pengawasannya sehingga dapat mengurangi paparan resiko OPD dengan pola penyelenggaraan pengawasan berdasarkan manajemen resiko. Manajemen resiko berasal dari pemilihan program dan kegiatan masing-masing OPD yang memiliki resiko tertinggi dan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pengawasan berbasis resiko yang diusulkan dalam suplemen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran audit kinerja dalam rangka menjaga sinkronisasi dan konsistensi secara efektif, efisien dan ekonomis dalam mewujudkan visi dan misi Walikota terpilih sehingga dapat mendukung terwujudnya *good governance* pada Pemerintahan Kota Magelang.

Rencana Tindak Lanjut pada Inspektorat Daerah Kota Magelang adalah:

1. Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi melalui kegiatan-kegiatan rapat koordinasi teknis, pemanggilan obyek pemeriksaan dalam rangka percepatan penyelesaian temuan;
2. Melaksanakan asistensi/pendampingan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas saran dan perbaikan terhadap pemeriksaan BPK-RI/APIP dan pendampingan terhadap laporan keuangan terhadap seluruh Perangkat Daerah Kota Magelang;
3. Meningkatkan Kapasitas SDM melalui diklat, PKS (pelatihan Kantor Sendiri), maupun webinar serta Pengelolaan SDM yang Optimal dalam rangka mewujudkan SDM yang Adaptif dan Technology Savvy (mengerti teknologi);
4. Meningkatan Sarana dan Prasarana untuk mendukung kelancaran pengawasan melalui Pengembangan infrastruktur dan sistem pengawasan;

5. Mendorong peran aktif dari mitra kerja untuk mengidentifikasi risiko dan kelemahan yang ada guna mengefektifkan kegiatan pengawasan;
6. Optimalisasi Manajemen Risiko sebagai upaya peningkatan pengendalian intern;
7. Pemenuhan Kebutuhan SDM pengawasan dengan kebijakan rekruitmen dan impassing;

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2023.

Magelang, 25 Juli 2022
INSPEKTUR DAERAH KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
INSPEKTORAT DAERAH

DEDDY EKO SUMARWANTO, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19690705 199703 1 007

Dipindai dengan CamScanner

WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2022 NOMOR 90

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 90 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA MAGELANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;

b. bahwa rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah telah dilakukan verifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diselaraskan dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2023 dan rencana kerja perangkat daerah lainnya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
(3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
(4) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. Bab 1 : pendahuluan;
   b. Bab 2 : hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya;
   c. Bab 3 : tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
   d. Bab 4 : rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
   e. Bab 5 : penutup.

(2) Uraian Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 22 Juli 2022
WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang

pada tanggal 22 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2023

DAFTAR PAGU INDIKATIF RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	116.701.015.538,00
2	Dinas Kesehatan Kota Magelang	253.248.522.874,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang	33.084.723.651,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang	27.491.385.299,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang	12.833.222.685,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang	5.015.890.376,00
7	Dinas Sosial Kota Magelang	10.838.760.922,00
8	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	12.178.715.010,00
9	Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	26.068.495.135,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang	5.957.775.486,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Magelang	10.779.362.487,00
12	Dinas Perhubungan Kota Magelang	17.438.172.427,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang	11.543.724.980,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	5.459.016.738,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang	14.133.714.058,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang	5.835.364.546,00
17	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang	9.317.670.659,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang	19.343.403.224,00
19	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang	30.025.324.802,00
20	Sekretariat Daerah Kota Magelang	41.955.050.115,00
21	Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	21.362.524.711,00
22	Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	21.867.971.591,00
23	Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	19.185.918.044,00
24	Inspektorat Kota Magelang	7.138.116.223,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kota Magelang	8.808.640.947,00
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	19.766.988.232,00
27	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Magelang	28.110.596.662,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang	7.482.873.810,00
	TOTAL	802.992.941.132,00

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ